

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Surabaya adalah ibukota dari Jawa Timur yang merupakan salah satu dari provinsi yang ada di Indonesia. Sebagai salah satu kota metropolitan yang ada di Indonesia, Kota Surabaya merupakan pusat bisnis, perdagangan, industri, dan pendidikan di Jawa Timur. Kota yang terletak 796 km sebelah timur Jakarta, atau 415 km sebelah barat laut Denpasar, Bali. Surabaya terletak di tepi pantai utara pulau Jawa dan berhadapan dengan Selat Madura serta Laut Jawa. Dengan luas sekitar 333,063 km², Surabaya mempunyai penduduk yang berjumlah 2.909.257 jiwa (2015).

Surabaya dikenal sebagai Kota Pahlawan, hal tersebut dikarenakan sejak terjadinya pertempuran oleh masyarakat Surabaya melawan tentara Belanda dalam meraih kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Secara etimologi Surabaya berasal dari bahasa Jawa yang merupakan penggabungan 2 kata, yaitu Sura atau Suro dan Baya atau Boyo. Sura dan Baya menurut mitosnya melambangkan hewan yang paling kuat dan menjadi simbol dari Kota Surabaya. Pendapat lainnya yang menyatakan nama Kota Surabaya diambil dari istilah "*Sura Ing Baya*" yang berarti "*berani menghadapi bahaya*".

Kota Surabaya merupakan sebuah pusat perdagangan komersial, pendidikan dan pelabuhan utama di wilayah timur Indonesia. Sebagai sebuah ibukota provinsi, Kota Surabaya juga merupakan rumah bagi banyak perusahaan dan pusat bisnis. Industri asing dan beberapa segmen industri yang terus berkembang menjadi pertumbuhan baru bagi Kota Surabaya. Dengan populasi yang lebih dari 2 juta jiwa dan pertumbuhan ekonomi yang cepat, Surabaya telah menjadi kota metropolitan dengan beberapa keanekaragaman didalamnya.

Kota Surabaya yang berlabel “*Metropolitan*”, menjadi tujuan belanja utama bagi orang Indonesia dan mancanegara karena banyaknya mal-mal besar yang ada di Surabaya seperti Plaza Tunjungan, Ciputra World Surabaya, Grand City, Galaxy Mall, City Of Tomorrow, Supermal Pakuwon Indah, BG Junction, Pakuwon Trade Center, Surabaya Town Square, LenMarc, Royal Plaza Surabaya, East Coast, Surabaya Plaza, Kapas Krampung Plaza, dan Jembatan Merah Plaza.

Sebagai perkotaan metropolitan, permasalahan lingkungan adalah masalah utama yang harus dihadapi. Kepadatan Kota Surabaya yang semakin kompleks dengan perkembangan jumlah penduduk yang tinggi menjadi ancaman dan tekanan yang besar bagi masalah lingkungan. Setiap penduduk memerlukan lahan, energi, dan sumber daya yang cukup besar untuk bertahan hidup. Disisi lain setiap orang juga menghasilkan limbah dalam beragam bentuk. Karena kepadatan penduduk yang melampaui batas kemampuan daya lingkungan untuk meregenerasi sendiri, hal tersebut berimbas pada kualitas hidup manusia yang semakin rendah.

Dalam mengatasi permasalahan tersebut, Surabaya menjalin hubungan *Sister City* dengan berbagai Negara di dunia. Dasar-dasar *Sister City* di Indonesia diatur dalam UU :

1. UU Tahun 1974 no 5 “Penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi, dekosentrasi, dan asas pembantuan.
2. UU Tahun 1999 no 37 mengenai kerjasama internasional dalam negeri.
3. UU Tahun 2004 no 32 tentang pemerintahan daerah diganti dengan UU Tahun 2014 no 23 tentang pemerintahan daerah, telah menetapkan landasan hukum serta semakin memberikan kejelasan tentang kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan hubungan luar negeri.

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, selama ini sudah menjalin hubungan kerjasama *Sister City* dengan Kota Seattle (AS); Busan (Korsel); Guangzhou (Tiongkok); Xiamen (Tiongkok); Kochi (Jepang); Kitakyushu (Jepang). Konsep *Sister City* diperkenalkan oleh Presiden Dwight D.Eisenhower pada tahun 1956 untuk meningkatkan diplomasi diantara pemerintah (*government to government diplomacy*). Kerjasama *Sister City* berlangsung oleh kota-kota yang berbeda Negara, baik dalam segi politik atau ideologi guna mencapai tujuan yang disepakati. Kerjasama *Sister City* biasanya dapat terjalin karena adanya persamaan sifat geografis, kebudayaan, latar belakang dan juga kesamaan tujuan.

Sister City juga mengacu pada desentralisasi yang mana memiliki arti yang luas sebagai sebuah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah

daerah. Tujuan desentralisasi sendiri yaitu merupakan upaya untuk menciptakan kemampuan unit pemerintah secara mandiri dan independen. (Koirudin, 2005)

Salah satu kerjasam *Sister City* Surabaya yang berlangsung hingga tahapan MoU ialah *Sister City* dengan Kitakyushu, Jepang. Kitakyushu termasuk dalam Prefektur Fukouka yang termasuk sebagai salah satu kota yang berada di Jepang. Kitakyushu yang didirikan pada 10 Februari 1963 dan ditetapkan sebagai “kota besar” pada 1 September 1963. Pada 1 Februari 2005, Kitakyushu mempunyai luas sebesar 486,81 km². Penduduknya berjumlah 1.014,608 jiwa dan kepadatan penduduknya sebesar 2.052,9 jiwa/km². Kitakyushu juga dikenal dengan kota internasional yang menjadi pembatas antara pulau utama Jepang di Selat Kanmon.

Kitakyushu mempunyai konsep kerjasama pada sektor Lingkungan Hijau, Teknologi Kota, dan Industri. Pendekatan Internasional yang dilakukan oleh Kitakyushu secara umum terbagi menjadi 2 kategori, yaitu yang pertama memajukan pertukaran ekonomi dengan negara-negara lain dengan tujuan mengubah struktur ekonomi wilayah dan menghasilkan energi perkotaan baru. Kedua ialah mentransfer teknologi industri dan teknologi pelestarian lingkungan untuk negara-negara berkembang sehingga dapat berkontribusi pada pengembangan dunia yang seimbang.

Hubungan *Sister City* berdasarkan kesamaan yang dimiliki oleh kedua belah pihak yang memungkinkan untuk melakukan kerjasama. Indonesia mengatur hubungan *Sister City* dalam undang-undang pemerintah daerah. Pemerintah daerah di tingkat provinsi diberikan kewenangan dalam melakukan kerjasama dengan pihak

asing yang juga ditur dalam otoda. untuk mengatur urusan dalam wilayahnya sendiri. *Sister city* bukanlah sebuah kewajiban yang di haruskan oleh negara untuk dilakukan pemerintah daerah. Adanya dasar hukum yang memperbolehkan kepada kota untuk mengelola pemerintahannya sendiri membuat kota-kota mampu membuka peluang kerjasama dalam skala Internasional. Kerjasama antar kota dengan kota diluar daerah atau diluar Negara dikenal sebagai *Sister City*.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian pada latar belakang masalah diatas maka dapat ditarik rumusan masalah yaitu “ *Bagaimana proses politik dari Pemerintah Surabaya dalam pengembangan Green Sister City dengan Pemerintah Kitakyushu dan apa saja program-program yang telah dijalankan dalam proses politik tersebut ?* “

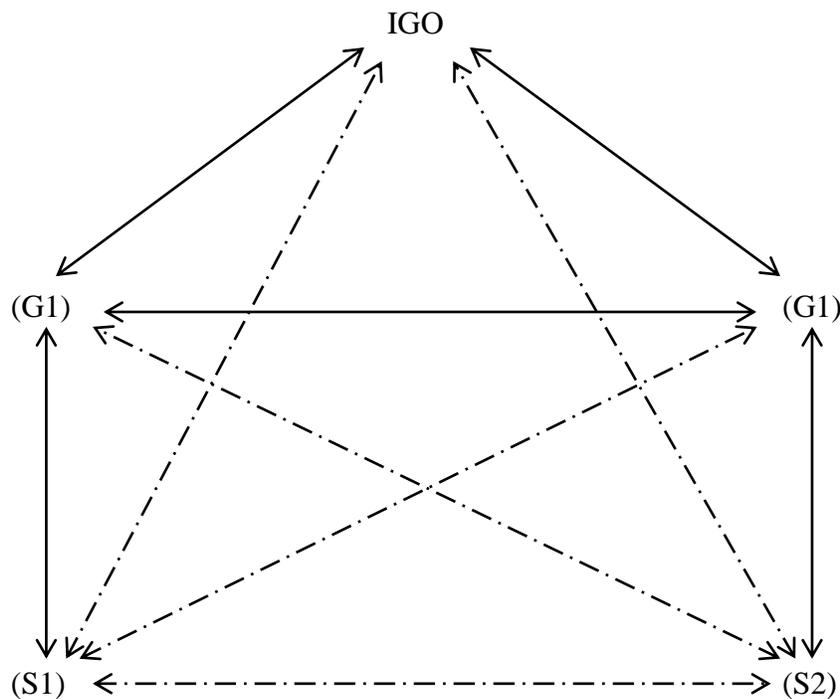
C. Kerangka Teori

1. Teori Kerjasama Internasional

Kerjasama internasional menurut Koesnadi Kartasasmita dalam buku “Organisasi Internasional” adalah kerjasama dalam masyarakat internasional merupakan suatu keharusan sebagai terdapatnya hubungan interdependensia dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional. Kerjasama internasional terjadi karena National Understanding dimana mempunyai corak dan tujuan yang sama; keinginan yang didukung untuk kondisi internasional yang saling membutuhkan. Kerjasama itu didasari oleh kepentingan bersama diantara negara-negara, namun kepentingan itu tidak identik.

Kerjasama internasional dewasa ini tidak lagi bersifat *state-centric*, hal karena kebutuhan pemenuhan pada sebuah negara mulai berubah dan berkembang mengikuti globalisasi. Dalam pemenuhannya kerjasama internasional mengikuti pola hubungan internasional yang bersifat transnasional dimana kerjasama internasional tidak lagi didasarkan pada hubungan *government to government* namun melainkan memunculkan aktor baru yang bernama pemerintah daerah (*Local Government*) menurut Sidik Jatmika yang digambarkan :

Gambar 1.1 Pola Transnasional



Sumber : Jatmika, Sidik. 2001. *Otonomi Daerah Dalam Prespektif Hubungan Intenasional*. Yogyakarta: Bigraf Publishing. Hal 54

Keterangan :

G = Government = Pemerintah Pusat

LG = Local Government = Pemerintah Daerah

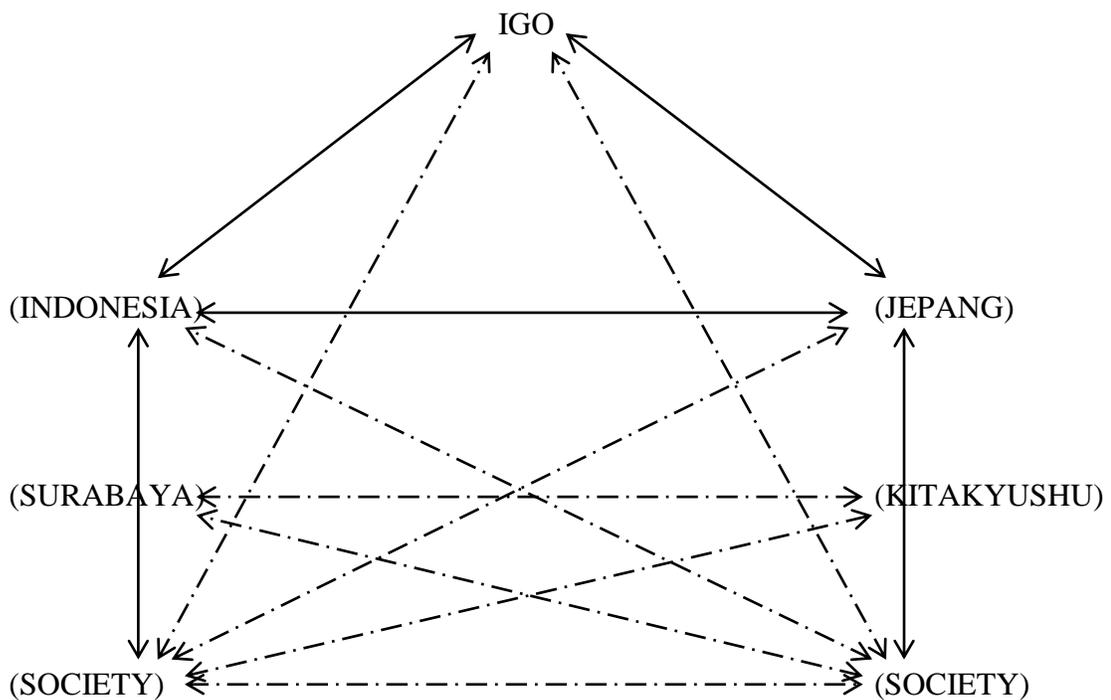
S = Society = Masyarakat (termasuk didalamnya Masyarakat Bisnis)

IGO = International Governmental Organization = Lembaga Internasional
Pemerintah

----- : Hubungan Transnasionalisme

————— : Hubungan Dalam Negeri

Gambar 1.2 Aplikasi Teori dalam Pola Transnasional



Sumber : Jatmika, Sidik. 2001. Otonomi Daerah Dalam Perspektif Hubungan Internasional. Yogyakarta: Bigraf Publishing.

Melalui gambar tersebut dapat dilihat bahwa hubungan internasional sekarang melahirkan aktor baru, yaitu pemerintah daerah (*Local Government*) baik tingkat I maupun tingkat II. Datangnya aktor *Local Government* akan menjadi kajian baru dalam kerjasama internasional yang membawa dampak penting bagi pola hubungan internasional yang bersifat transnasional. Pemberian wewenang pada daerah otonomi seluas-luasnya dianggap sebagai pembaharuan dalam demokrasi yang menghargai hak-hak asasi manusia menuju pembentukan masyarakat madani (*Civil Society*).

Surabaya dan Kitakyushu merupakan *local government* yang menjalin kerjasama internasional dalam bentuk *Sister City*. Hal tersebut sesuai dengan teori kerjasama internasional yang berpola transnasional.

2. Konsep Paradiplomacy

Istilah ‘Paradiplomacy’ pertama kali diluncurkan pada tahun 1980-an oleh ilmuwan asal Basque, Panayotis Soldatos. Hal tersebut sebagai penggabungan istilah ‘Parallel diplomacy’ menjadi ‘Paradiplomacy’.

Paradiplomacy mengacu pada perilaku dan kapasitas untuk melakukan hubungan luar negeri dengan pihak asing yang dilakukan entitas “*sub-state*”, atau pemerintah regional/pemda, dalam rangka kepentingan mereka secara spesifik (Mukti, 2013). Hubungan ini merujuk pada hubungan atau kerjasama Internasional yang dilakukan

oleh daerah regional atau lokal (bukan pemerintah pusat), untuk menjalankan kepentingannya. Hubungan dan kerjasama Internasional yang dilakukan oleh penda itu sebagian besar akan diorientasikan untuk peningkatan ekonomi daerah atau dukungan terhadap berbagai program kerja di sektor-sektor unggulan seperti pendidikan, kesehatan, pariwisata dan juga lingkungan.

Konsep *Paradiplomacy* yang menyatakan bahwa hubungan luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah daerah dilakukan karena adanya kepentingan yang dimiliki. Kepentingan yang dimiliki oleh tiap-tiap pemerintah daerah tentunya berbeda-beda, namun biasanya kepentingan tersebut terkait erat dengan masalah pembangunan daerah.

Sesuai dengan konsep ini terjawab bahwa hubungan kerjasama yang dijalin oleh Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Kota Kitakyuhsu berbasis pada konsep lingkungan, karena adanya kepentingan yang sama antar kedua belah pihak.

D. Hipotesa

Proses politik Pemerintah Kota Surabaya dalam pengembangan *Green Sister City* dengan pemerintah Kota Kitakyushu melalui beberapa tahapahan seperti penawaran, penjajagan, LOI, dan MoU. Hal tersebut didukung dengan program kerjasama seperti pengiriman rutin delegasi staf-staf Pemerintah Surabaya ke Kota Kitakyushu untuk mengikuti *study visit/study banding*.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dan sasaran dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Membahas secara ilmiah tentang kerjasama internasional dalam bentuk *Green Sister City* antara Kota Surabaya dan Kota Kitakyushu.
2. Menjawab rumusan masalah dan membuktikan hipotesa yang dikemukakan.
3. Menerapkan ilmu dan teori yang diperoleh selama masa perkuliahan agar dapat menjelaskan permasalahan yang diteliti.
4. Memenuhi kewajiban akademis untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

F. Metodologi Penelitian

1. dari Subjek, Nation State, dan Regional

Subjeknya sendiri merupakan Kota Surabaya dan Kitakyushu yang melakukan kerjasama dimulai pada tahun 1997 dan kerjasama *Green Sister City* dari 2012-2015.

2. Data yang dibutuhkan

Masalah yang dibahas dalam skripsi ini yaitu masalah kerjasama antara Kota Surabaya dan Kota Kitakyushu dengan pokok bahasan *Green*

Sister City. Dengan demikian maka data yang dibutuhkan sebagai bahan analisis adalah :

- a. Data pembentukan kerjasama dan pelaksanaannya.
- b. Kepentingan Surabaya dari kerjasama tersebut.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan tersebut seperti diatas, dilakukan dengan menggunakan cara pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Dokumentasi, mengabadikan, memeriksa dan mempelajari dokumen-dokumen yang dibutuhkan.
- b. Wawancara (interview) yaitu cara pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab kepada responden yang bersangkutan. Dalam hal ini adalah kepala sub bagian yaitu kerjasama dengan pemerintah dan lembaga luar negeri dari Badan Kerjasama dan Pemerintah Kota Surabaya, dan pihak lain yang berkepentingan dengan objek penelitian.

4. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah :

- a. Penelitian Perpustakaan (Library Research)

Penelitian perpustakaan adalah penelitian dengan cara membaca, mempelajari berbagai literatur yang relevan untuk mendapatkan landasan teori yang akan diterapkan pada masalah yang diteliti.

b. Penelitian lapangan (Field Research)

Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan secara langsung pada objek yang diteliti dengan maksud untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan secara lengkap dan reliable sebagai data primer.

c. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif.

Secara garis besar deskriptif artinya adalah menggambarkan atau menguraikan hasil dari pengamatan (observasi atau gejala, dan kondisi aktual), sedangkan kualitatif artinya naratif atau paparan yang secara ilmiah berwujud susunan kata dan kalimat yang dituangkan dalam skripsi.

G. Jangkauan Penelitian

Agar pembahasan tidak menyimpang dari tema dan tujuan yang diinginkan, maka penulis menetapkan jangkauan penelitian difokuskan pada kepentingan yang dimiliki oleh Kota Surabaya dalam kerjasama *Green Sister City* dengan kota Kitakyushu. Selain itu juga bentuk-bentuk dari kegiatan kerjasama apa saja yang telah berlangsung dari kepentingan Kota Surabaya tersebut. Dalam hal ini, kerjasama yang

diamati mulai tahun 2012 yang mana penandatanganan *MoU Green Sister City* sebagai salah satu penanda komitmen *Sister City* oleh kedua kota di bidang lingkungan sampai sekarang (2015) program-program dari *Green Sister City* masih berjalan untuk mendapatkan hasil yang maksimal . Kemudian manfaat dan keuntungan apa saja yang bisa di dapat oleh Kota Surabaya dari kerjasamanya dengan Kota Kitakyushu yang telah dilakukan.

Maka jangkauan penelitian yang diperlukan adalah data yang berkaitan dengan proses persiapan kerjasama dari kedua belah pihak, realisasi kerjasama serta manfaat dari kerjasama tersebut.

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dari skripsi ini adalah :

Bab I menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesa, tujuan penelitian, jangkauan penelitian, teknik pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

Bab II menguraikan tentang indikator pembangunan lingkungan dan kondisi/dinamika Kota Surabaya dan Kota Kitakyushu sebagai *Green Sister City*.

Bab III memaparkan landasan hukum dan kerjasama luar negeri pemerintah daerah.

Bab IV memaparkan tentang proses politik Pemerintah Kota Surabaya dalam menjalin kerjasama Green Sister dengan Pemerintah Kota Kitakyushu dan program-program kerjasama yang telah berlangsung.

Bab V berisi tentang kesimpulan.

